

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *FISCAL STRESS* DI INDONESIA

AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FISCAL STRESS IN INDONESIA

CHAIRATUL DJANNAH

A032221009



PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *FISCAL*
STRESS DI INDONESIA**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

disusun dan diajukan oleh:

CHAIRATUL DJANNAH

A032221009



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *FISCAL STRESS* DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

CHAIRATUL DJANNAH
A032221009

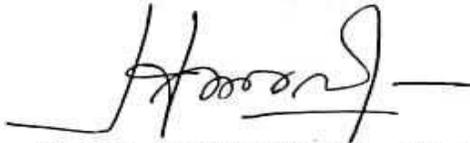
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



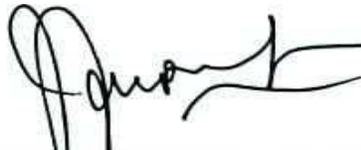
Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA., CRP
NIP. 19590306 198503 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM®
NIP. 19600516 199003 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Chairatul Djannah**

NIM : A032221009

Program Studi : Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Fiscal Stress* di Indonesia** adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 November 2023

Yang menyatakan,


CHAIRATUL DJANNAH



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Ekonomi (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Fiscal Stress* di Indonesia**”. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu serta membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda (Yasim Miala) dan Ibunda (Sitti Nurlaela) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta untuk saudaraku yang telah mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA. CRP dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. CWM[®] sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dan juga ucapan terima kasih kepada tim penguji, yaitu Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM[®], Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS dan Bapak si Fattah, SE. M.Si. CWM[®]., CSF.



Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti tujukan kepada teman-teman peneliti Nadiyah Nursahbani Rala, Nur Amaliah Malik, Sitti Nabilah Rofifah, Acil dan teman seperjuangan Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 2022 (1), serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala bantuan selama peneliti menempuh pendidikan.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Penulis sadar tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat terbuka atas masukan dan saran yang dapat membangun penelitian ini kedepannya.

Makassar, 27 November 2023

CHAIRATUL DJANNAH



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

CHAIRATUL DJANNAH, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Fiscal Stress di Indonesia*, (dibimbing oleh Abdul Hamid Paddu dan Anas Iswanto Anwar).

Fiscal stress ditingkat daerah menjadi cukup penting diperhatikan terutama pada era otonomi daerah saat ini dimana daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan penyediaan barang bagi masyarakatnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji regresi persamaan simultan yang diestimasi menurut koefisien *reduced form*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) akumulasi modal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita, 2) produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita, 3) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita, 4) upah memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita, 5) akumulasi modal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis, 6) produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis, 7) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis, 8) upah memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis, 9) PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.

Kata kunci : akumulasi modal, produktivitas tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, upah, pdrb per kapita, siklus bisnis, *fiscal stress*



ABSTRACT

CHAIRATUL DJANNAH, *An Analysis of Factors Affecting Fiscal Stress in Indonesia*
(supervised by Abdul Hamid Paddu and Anas Iswanto Anwar)

Fiscal stress at the regional level is quite important to pay attention to, especially in the current era of regional autonomy where regions are required to be able to organize government, public services, and provide goods for their communities. Data collection in this research was carried out using library research. Data analysis was conducted using a simultaneous equation regression test which was estimated using reduced form coefficients. Research results show that (1) capital accumulation has an influence on fiscal stress directly and indirectly through GDP per capita; (2) labor productivity has an influence on fiscal stress directly and indirectly through GDP per capita; (3) government spending has an influence on fiscal stress directly or indirectly through GRDP per capita; (4) wages have an influence on fiscal stress directly or indirectly through GRDP per capita; (5) capital accumulation has an influence on fiscal stress directly or indirectly through the business cycle; (6) productivity labor has an influence on fiscal stress directly or indirectly through the business cycle; (7) government spending has an influence on fiscal stress directly or indirectly through the business cycle; (8) wages have an influence on fiscal stress directly or indirectly through the business cycle; (9) GDP per capita has an influence on fiscal stress directly and indirectly through the business cycle.

Key words: capital accumulation, labor productivity, government expenditures, wages, GRDP per capita, business cycle, fiscal stress



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	14
2.1 Tinjauan Konseptual.....	14
2.1.1 Fiscal Stress.....	14
2.1.2 Siklus Bisnis.....	16
2.1.3 PDRB per Kapita.....	22
2.1.4 Akumulasi Modal.....	24
2.1.5 Produktivitas Tenaga Kerja.....	25
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah.....	27
2.1.7 Upah.....	29
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	34
2.2.1 Kaitan Teoretis Akumulasi Modal, PDRB per Kapita, dan <i>Fiscal Stress</i>	34
2.2.2 Kaitan Teoretis Produktivitas Tenaga Kerja, PDRB per Kapita, dan <i>Fiscal Stress</i>	35
2.2.3 Kaitan Teoretis Pengeluaran Pemerintah, PDRB per Kapita, dan <i>Fiscal Stress</i>	36
2.2.4 Kaitan Teoretis Upah, PDRB per Kapita, dan <i>Fiscal Stress</i>	38
2.2.5 Tinjauan Teoretis Akumulasi Modal, Siklus Bisnis, dan <i>Fiscal stress</i>	39
2.2.6 Tinjauan Teoretis Produktivitas Tenaga Kerja, Siklus Bisnis, dan <i>Fiscal Stress</i>	40
2.2.7 Tinjauan Teoretis Pengeluaran Pemerintah, Siklus Bisnis, dan <i>Fiscal Stress</i>	41
2.2.8 Tinjauan Teoretis Upah, Siklus Bisnis, dan <i>Fiscal Stress</i>	42
2.9 Tinjauan Teoretis PDRB per Kapita, Siklus Bisnis, dan <i>Fiscal stress</i>	43
Tinjauan Empiris.....	44
.....	48
Kerangka Konseptual.....	48



3.2	Hipotesis	55
BAB IV	57
4.1	Lokasi Penelitian	57
4.2	Jenis dan Sumber Data	57
4.3	Populasi dan Sampel.....	57
4.4	Teknik Pengumpulan Data	57
4.5	Definisi Operasional Variabel	58
4.6	Metode Analisis Data.....	61
BAB V	64
5.1	Deskripsi Data.....	64
5.1.1	Deskripsi mengenai Akumulasi Modal.....	64
5.1.2	Deskripsi mengenai Produktivitas Tenaga Kerja.....	65
5.1.3	Deskripsi mengenai Pengeluaran Pemerintah.....	66
5.1.4	Deskripsi mengenai Upah.....	68
5.1.5	Deskripsi mengenai PDRB per Kapita.....	69
5.1.6	Deskripsi mengenai Siklus Bisnis.....	71
5.1.7	Deskripsi mengenai <i>Fiscal Stress</i>	72
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
5.3	Pembahasan.....	87
5.3.1	Pengaruh Akumulasi Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui PDRB per Kapita.....	87
5.3.2	Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui PDRB per Kapita.....	88
5.3.3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui PDRB per Kapita.....	89
5.3.4	Pengaruh Upah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui PDRB per Kapita	91
5.3.5	Pengaruh Akumulasi Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Siklus Bisnis	92
5.3.6	Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Siklus Bisnis	93
5.3.7	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Siklus Bisnis	94
5.3.8	Pengaruh Upah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Siklus Bisnis	95
5.3.9	Pengaruh PDRB per Kapita terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Siklus Bisnis	96
BAB VI	98
6.1	Keimpulan.....	98
6.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 5. 1 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	74
Tabel 5. 2 Pengaruh Akumulasi Modal, Produktivitas Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, dan Upah terhadap Fiscal Stress melalui PDRB per Kapita dan Siklus Bisnis	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Trend Rata-rata Fiscal Stress, Unemployment Rate, dan PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia (2018-2022)	8
Gambar 2. 1 Siklus Bisnis	21
Gambar 2. 2 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja	32
Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian.....	55
Gambar 5. 1 Perkembangan Tingkat Investasi provinsi di indonesia (2018-2022) ..	64
Gambar 5. 2 Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja provinsi di Indonesia (2018-2022).....	66
Gambar 5. 3 Rasio Belanja Pendidikan provinsi di Indonesia (2018-2022)	67
Gambar 5. 4 Perkembangan Tingkat Upah provinsi di Indonesia (2018-2022).....	69
Gambar 5. 5 Perkembangan Tingkat PDRB Per Kapita ADHK provinsi di Indonesia (2018-2022).....	70
Gambar 5. 6 Perkembangan Tingkat Pengangguran provinsi di Indonesia (2018-2022)	72
Gambar 5. 7 Rata-rata Fiscal Stress Provinsi di Indonesia (2018-2022)	73
Gambar 5. 8 Bagan Estimasi Kerangka Konseptual Penelitian	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data yang Digunakan.....	109
Lampiran 2 Hasil Pengujian Data.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fiscal stress ditingkat daerah menjadi cukup penting diperhatikan terutama pada era otonomi daerah saat ini dimana daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan penyediaan barang bagi masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru perlu untuk terus dilaksanakan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat tiap tahunnya (Firstanto, 2015). Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang cukup beruntung karena mempunyai sumber-sumber pendapatan yang potensial, yang berasal dari retribusi daerah, pajak, bahkan ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Tetapi, dilain sisi untuk beberapa daerah, otonomi bisa jadi menciptakan persoalan sendiri karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Sehingga pada akhirnya memicu suatu daerah mengalami *fiscal stress* (Sanjaya et al., 2021).

Menurut Septiara & Prawira (2019) *fiscal stress* terjadi saat penerimaan negara tidak dapat memenuhi pengeluaran atau belanja negara, baik ditingkat daerah maupun nasional. Muryawan & Sukarsa (2016) menjelaskan pada dasarnya otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar kepada pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, baik itu yang menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan kekayaan daerah tersebut. Akan tetapi yang terjadi



setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, terdapat daerah yang tidak memiliki potensi yang memadai, hal tersebut sangat memberatkan suatu daerah karena tidak memiliki sumber daya yang cukup melimpah dan pada akhirnya daerah tersebut akan kesulitan untuk membiayai belanja daerahnya dan akan memicu timbulnya kesulitan keuangan, yang biasanya dikenal dengan *fiscal stress*.

Literatur terkait kondisi keuangan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh Arnett (2011), antara lain: (1) defisit anggaran (*budget deficit*), (2) saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unserved budget balance*), (3) penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performances*), (4) peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*), (5) dan rasio keuangan (*financial ratios*).

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting penyebab terjadinya *fiscal stress*. Menurut Arnett (2011) *fiscal stress* adalah kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran atau belanja daerah yang dapat dilihat dari kondisi

domi (siklus bisnis) daerah tersebut mengalami peningkatan, namun apabila diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress* (Shamsub & Akoto, 2004).



Shamsub & Akoto (2004) menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. Faktor siklus bisnis seperti pertumbuhan, inflasi dan tingkat pengangguran. Indikator ekonomi ini sering memberikan “peringatan dini” tentang tekanan fiskal di masa depan. Siklus bisnis adalah fluktuasi (naik turunnya) *output* dan kesempatan kerja secara periodik. Perekonomian akan mengalami fluktuasi diindikasikan oleh naik turunnya PDB dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek (*short run*) fluktuasi ini disebabkan antara lain oleh perubahan permintaan agregat dan dalam jangka panjang fluktuasi disebabkan oleh perubahan modal, kualitas tenaga kerja dan teknologi produksi. Fluktuasi naik turunnya kegiatan ekonomi (siklus bisnis) pada saat terjadinya kontraksi ditandai dengan tingginya pengangguran yang meningkat. Makin tinggi tingkat pengangguran menuntut daerah mengeluarkan belanja lebih tinggi yang dapat menimbulkan *fiscal stress* apabila tidak diimbangi dengan pendapatan daerah tersebut.

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapat pekerjaan (Rahardja & Manurung, 2008). Suatu aspek dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik, karena menjaga para pekerja tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan (N. G. Mankiw, 2007). Sehingga, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan bisa diukur untuk suatu tahun itu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian semakin tinggi tingkat ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai



(Wahyuningsih, 2017). Ini sejalan dengan teori Keynesian, di mana teori tersebut mendasari bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar, seperti terjadinya pengangguran yang tinggi, sehingga jika suatu daerah tingkat penganggurannya tinggi akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan pengeluarannya.

Keynes mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk melakukan peningkatan permintaan di tingkat makro, mengurangi pengangguran dan terjadinya deflasi. Jika pemerintah melakukan peningkatan pada pengeluaran maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan secara keseluruhan akan meningkat, tabungan juga akan meningkat untuk digunakan sebagai modal (Curatman, 2010). Pengangguran yang terjadi di Indonesia maupun pengangguran yang ada di provinsi di pengaruhi oleh indikator-indikator ekonomi yang diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, produktivitas, pengeluaran pemerintah, dan tingkat upah. Teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal. Meningkatnya stok barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sebab peningkatan stok barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan



ingkatkan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi h pengangguran yang ada (Saputri, 2019).

Dalam fungsi produksi, apabila produktivitas mengalami peningkatan maka kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output akan meningkat sehingga akan berdampak terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja ini akan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, apabila produktivitas mengalami penurunan maka kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan *output* akan menurun sehingga akan berdampak terhadap penurunan permintaan tenaga kerja. Penurunan permintaan tenaga kerja ini akan meningkatkan tingkat pengangguran (Zulhanafi, 2013). Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat menurunkan biaya produksi per unit barang. Dengan turunnya biaya produksi per unit, pengusaha dapat menurunkan harga jual. Oleh sebab itu, permintaan masyarakat akan barang tersebut bertambah. Pertambahan permintaan akan barang mendorong pertambahan produksi dan selanjutnya menambah permintaan tenaga kerja (Simanjuntak, 1998).

Pertambahan permintaan tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh upah, menurut Hohberg & Lay (2015) dalam penelitiannya terkait dengan efek dari upah minimum terhadap kondisi tenaga kerja di Indonesia memiliki efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Dengan meningkatnya upah minimum, maka akan merangsang daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang pada akhirnya pengangguran berkurang (Bicerli & Kocaman, 2019). Sebagaimana dengan penelitian Sutansyah tentang pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2013-2018. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa upah



um memiliki pengaruh terbesar dalam mengurangi pengangguran di esia (Sutansyah, 2019). Mankiw (2012) memaparkan jika tingkat upah alami kenaikan maka akan memengaruhi peningkatan jumlah

pengangguran, karena salah satu hal yang menyebabkan tingginya pengangguran ialah adanya kekakuan upah, yakni gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian hingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Penetapan upah minimum yang lebih rendah menjadikan perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Keynes dalam bukunya “*The General Theory*” mengungkapkan bahwasanya peningkatan dalam kesempatan kerja dapat terjadi jika tingkat upah mengalami penurunan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *fiscal stress* juga disebabkan karena penerimaan daerah yang sudah tidak dapat membiayai kebutuhan daerah tersebut. Sehingga, dari sisi penerimaan daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Shamsub & Akoto (2004) menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah akan menurunkan angka *fiscal stress*. Karena pada dasarnya untuk mengurangi kondisi *fiscal stress* pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2015) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*.

Menurut Muda (2012) peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dijelaskan



1 teori Solow, Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi h rangkaian kegiatan yang berasal dari manusia, akumulasi modal, kaian teknologi, dan hasil (*output*). Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak

positif dan negatif, sehingga menurut Robert Solow penambahan jumlah penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian adalah ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Sehingga, semakin tinggi tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan tingkat outputnya (Ifani, 2021).

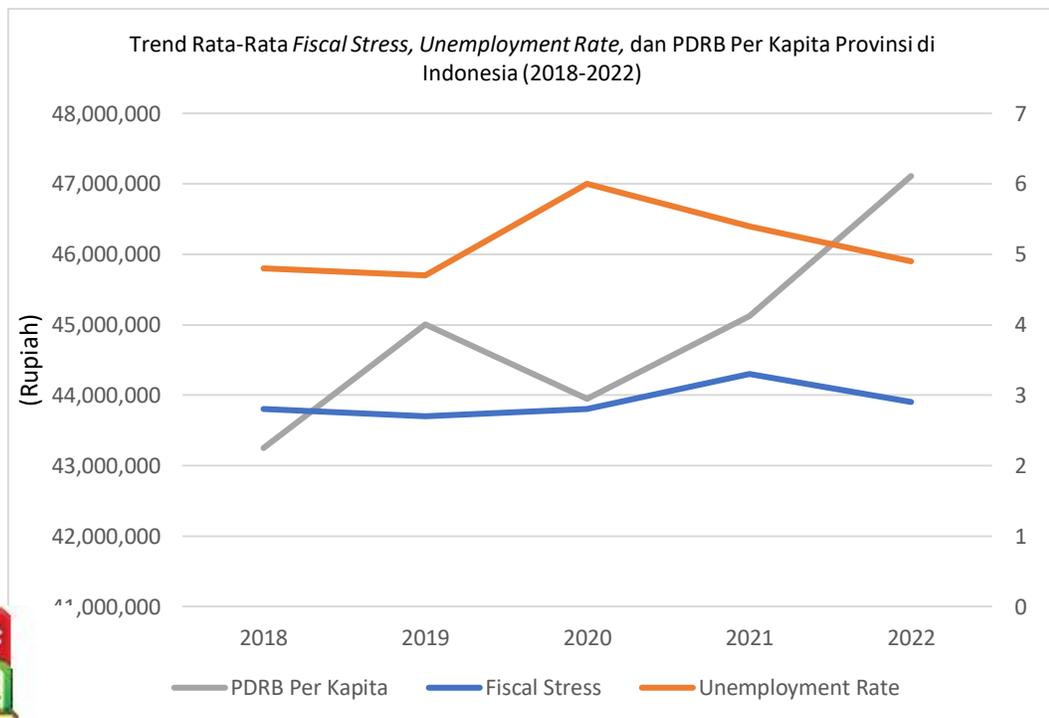
Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah salah satunya melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2014). Upah dan gaji adalah pendapatan bagi pekerja (Tarigan, 2012).

Maka dari itu unsur upah minimum diperlukan dalam PDRB per kapita. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran (Utami, 2018). Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Askenazy (2003) yang menunjukkan



bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap PDRB per kapita melalui akumulasi modal manusia. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah akan menurunkan risiko daerah tersebut mengalami *fiscal stress*. Karena pada dasarnya untuk mengurangi risiko tersebut pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Shamsub & Akoto, 2004). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Septira et al., (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB per kapita berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Untuk lebih jelasnya trend rata-rata *fiscal stress*, *unemployment rate*, dan PDRB per kapita provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: DPJK Kemenkeu dan BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 1. 1 Trend Rata-rata *Fiscal Stress*, *Unemployment Rate*, dan PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia (2018-2022)



Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui dari pengukuran *fiscal stress* menggunakan rasio keuangan dengan melihat rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, di mana jika rasionya 1 belum terindikasi adanya *fiscal stress*, *stress* terjadi jika rasio > 1 , sehingga dapat disimpulkan melalui gambar 1.1 bahwa dari perhitungan rata-rata tekanan fiskal tiap provinsi di Indonesia tiap tahunnya (2018-2022) tingkat rasionya > 1 . Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018-2022 rata-rata tingkat *fiscal stress* dari seluruh provinsi di Indonesia rasionya > 1 , di mana rasio yang paling tinggi ada pada tahun 2021 yakni 3.3 Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah di Indonesia tidak mampu untuk dibiayai lagi oleh penerimaannya.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dari perhitungan rata-rata tingkat pengangguran tiap provinsi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021, hal ini tentunya tidak sejalan dengan dasar teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa kenaikan tingkat pengangguran akan menaikkan tekanan fiskal. Di mana pada tahun 2021 rata-rata tingkat pengangguran dari seluruh provinsi di Indonesia sebesar 5.4 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pajak daerah berkurang yang berdampak pada penerimaan suatu daerah yang akan mendorong terjadinya tekanan fiskal yang lebih tinggi. Sesuai dengan ide dasar dari Keynes yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam mengatur (regulator) perekonomian agar stabilitas perekonomian terjaga, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Pemerintah memengaruhi perekonomian dengan kebijakan fiskal dalam bentuk: pemerintah membeli barang dan jasa (G)



menghasilkan barang dan jasa (*output* pemerintah) yang merupakan onen dari permintaan agregat atau penawaran dan pemerintah merubah (Tx) dan transfer (Tr) yang memengaruhi *output*, pendapatan (Y) dan

pendapatan disposibel (pendapatan yang tersedia untuk konsumsi atau tabungan dalam rumah tangga, Y_d).

Pada gambar 1.1 juga dapat dilihat dari trend perkembangan PDRB per kapita tiap provinsi di Indonesia bahwa terjadi fluktuasi selama kurun waktu dari tahun 2018-2022, sedangkan untuk trend *fiscal stress* cenderung stabil pada tahun 2018-2022, sehingga hubungan antara PDRB per kapita dengan *fiscal stress* menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, dengan melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi *fiscal stress*.

Daerah yang mengalami *fiscal stress* menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak dapat bekerja secara optimal untuk mencapai target-target pemasukan yang berasal dari pendapatan daerahnya dan masih masih belum mampu untuk menemukan solusi agar kinerja keuangannya dapat lebih baik lagi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian: **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Fiscal Stress* di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akumulasi modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita?
2. Apakah produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita?



4. Apakah upah berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita?
5. Apakah akumulasi modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis?
6. Apakah produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis?
7. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis?
8. Apakah upah berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis?
9. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap *fiscal stress* secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh akumulasi modal terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita.



4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh upah terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita.
5. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh akumulasi modal terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.
6. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.
7. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.
8. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh upah terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.
9. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap *fiscal stress* provinsi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui siklus bisnis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu dari segi teori yang dipakai peneliti pada penelitian ini, dan



juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang membaca penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada dan juga hasil penelitian diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan guna menghindari terjadinya *fiscal stress* di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 *Fiscal Stress*

Fiscal stress adalah suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga terdapat beberapa aspek dalam menginterpretasikannya dan mendefinisikannya (Rakabe, 2013). Berdasarkan literatur yang ada sebelumnya, dijelaskan bahwa *fiscal stress* merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara apa yang pemerintah berikan dengan yang diinginkan oleh publik dengan sumber daya yang tersedia (Septira et al., 2019). Sedangkan, pengertian *fiscal stress* yang didefinisikan oleh Arnett (2011) merupakan keadaan di mana pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka panjang maupun jangka pendek serta pemerintah juga tidak dapat meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa dalam hal ini pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk mengetahui adanya *fiscal stress* dapat dilihat melalui pengeluaran daerah (belanja modal) apakah mengalami peningkatan, tetapi jika tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal tersebut dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress* (Shamsub & Akoto, 2004). Menurut Sanjaya et al., (2021) *fiscal stress* juga menjadi semakin meningkat sebab adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian yang diukur melalui meningkatnya penerimaan sendiri untuk menangani berbagai macam pengeluaran yang ada. Sehingga, ketersediaan



sumber-sumber daya potensial dan kesiapan suatu daerah menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan dalam era otonomi.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan pemerintah daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerahnya. Artinya, pemerintah daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu, kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan pemerintah daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Literatur yang terkait dengan kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Ada lima kategori penting pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh Arnett (2011) yaitu: (1) Defisit anggaran (*budget deficit*), (2) Saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unserved budget balance*), (3) Penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performance*), (4) Peningkatan pajak relatif terhadap tren pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*), dan (5) Rasio keuangan (*financial ratios*). Dari hasil kajian Arnett (2011) menekankan bahwa *fund balance* (saldo dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) penting dalam menetapkan indikator *fiscal stress*, sebab dianggap mewakili kemampuan pemerintah agar tetap bertahan bekerja meski dalam

an ekonomi yang mengalami masalah keuangan sekalipun. Pemerintah masih memiliki saldo dana (*fund balance*) masih mampu bertahan beroperasi menyerap dampak negatif dari permasalahan keuangan. Dalam hal



spektrum kondisi keuangan publik, *fiscal stress* ini dapat dikategorikan sebagai keadaan keuangan publik yang lemah (*weak financial condition*).

Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian utama dalam penyusunan APBD sebagai upaya meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi *fiscal stress*, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya sebagai upaya meningkatkan pembiayaan daerah (Dwitayanti et al., 2019).

2.1.2 Siklus Bisnis

Menurut (Samuelson & Nordhaus, 2004) siklus bisnis adalah fluktuasi ekonomi pada total *output* nasional, pendapatan, dan ketenagakerjaan, biasanya berlangsung selama periode 2 hingga 10 tahun, yang ditandai oleh kontraksi atau ekspansi yang tersebar luas pada kebanyakan sektor ekonomi. Ada banyak teori yang dapat digunakan dalam menjelaskan siklus bisnis (*business cycle*). Namun ada beberapa teori yang umumnya digunakan para ekonom untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya siklus bisnis (*business cycle*) ini seperti:

1. Teori *Real Business Cycle*

Pendekatan yang digunakan kaum klasik dalam siklus bisnis (*business cycle*) terutama disebabkan oleh *shock* yang terjadi pada sisi penawaran agregat (*agregat supply*) bukan karena perubahan permintaan agregat (*agregat demand*). Guncangan produktivitas atau inovasi pada satu sektor dapat menyebar dan menyebabkan resesi dan inflasi. Dalam teori klasik, dimana kaum klasik mendikotomikan sektor riil dan sektor moneter atau yang disebut dikotomi klasik (*dychotomi classic*). Dikotomi klasik



adalah dimana sektor moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Mereka mempercayai uang itu bersifat netral sehingga kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja yang ada maupun tingkat *output* perekonomian. *Rational expectation* merupakan dasar teoritis mengenai dugaan bahwa kebijakan moneter tidak memiliki pengaruh yang berarti pada siklus bisnis.

Teori siklus bisnis riil memiliki pandangan bahwa penawaran tenaga kerja pada waktu tertentu bergantung pada insentif yang diterima oleh para pekerja. Setiap pekerja merubah cara kerja secara sukarela dengan merespon kondisi perekonomian yang berubah dalam jangka pendek. Apabila pekerja mendapat suatu insentif atau diperlakukan dengan baik maka mereka akan memilih bekerja lebih lama, dan apabila sebaliknya hasil yang mereka dapat dari bekerja kurang dan tidak baik maka para pekerja akan memilih untuk mengurangi dan merealokasi waktu bekerja mereka, bahkan para pekerja dapat berhenti bekerja untuk sementara waktu. Hal ini yang biasa disebut substitusi tenaga kerja antar waktu (*intemporal substitution of labor*). Menurut teori ini pekerja menganalisis biaya dan manfaat apakah mereka bekerja atau istirahat tanpa bekerja. Substitusi tenaga kerja antar waktu (*intemporal substitution of labor*) digunakan teori siklus bisnis riil untuk menjelaskan kenapa *output* dan kesempatan kerja tidak stabil atau belfluktuasi.

Teori siklus bisnis riil juga menganggap guncangan teknologi (*shock technology*) sangat berpengaruh pada fluktuasi *output*. Dimana teknologi menjadi variabel yang menentukan banyaknya jumlah *output* yang



dihasilkan. Apabila teknologi berkembang maka tingkat *output* berkembang pula, *output* perusahaan akan meningkat, jumlah kesempatan kerja akan dan menaikkan upah rill dan secara keseluruhan *output* perekonomian akan meningkat. Sebaliknya keadaan resesi adalah keadaan dimana teknologi mengalami penurunan. Pada fleksibilitas upah dan harga, teori ini menjelaskan *clear market* dimana memakai asumsi bahwa harga dan upah disesuaikan dengan cepat sesuai keadaan perekonomian dengan kata lain pasar akan menyesuaikan titik keseimbangan secara cepat.

2. Teori Keynes *Business Cycle*

Para penganut teori keynes mematahkan teori klasik dimana pada saat terjadi resesi, teori klasik tidak dapat menjelaskan bagaimana perekonomian dapat menyesuaikan keadaan secara otomatis. Menurut Minsky (1986) teori neoklasik tidak dapat menjelaskan siklus bisnis dengan krisis biasa yang terjadi dari hasil operasi internal ekonomi.

Menurut teori *New Keynes* harga bersifat kaku dalam jangka pendek karena penyesuaian harga berjalan lambat. Apabila penurunan harga yang dilakukan satu perusahaan maka akan memberikan keuntungan pada perusahaan lain diperekonomian. Saat harga turun maka harga rata-rata akan juga diturunkan dan meningkatkan keseimbangan uang rill. Peningkatan uang rill akan memperbesar pendapatan agregat dan akan meningkatkan permintaan terhadap *output* seluruh perusahaan. Menurut Mankiw (2006) biaya menu walaupun perubahannya kecil terhadap perusahaan tapi berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang besar dari penyesuaian harga oleh satu



perusahaan pada permintaan perusahaan lain ini disebut eksternalitas permintaan agregat (*agregat demand externalitiy*). Teori ini membahas tentang resesi yang diakibatkan dari kegagalan koordinasi antar perusahaan dan lambannya perubahan penetapan upah dan harga akibat guncangan harga pada perekonomian.

3. Teori *Monetary Business Cycle*

Menurut Gustiani et al., (2010) teori moneter dalam siklus bisnis (*monetary business cycle*) menekankan pentingnya sektor moneter dalam memengaruhi siklus bisnis (*business cycle*). Teori moneter menghubungkan siklus bisnis (*business cycle*) dengan ekspansi dan kontraksi uang dan jumlah kredit, moneter merupakan faktor utama terjadinya fluktuasi dalam permintaan agregat (Samuelson & Nordhaus, 2004). Teori Keynes dan moneter memiliki kesamaan yang terletak pada anggapan bahwa uang merupakan faktor eksogen yang memengaruhi *output*. Belajar dari keadaan dimana krisis keuangan dapat menyebabkan fluktuasi pada siklus bisnis (*business cycle*). Pentingnya menjaga stabilitas keuangan dalam hal ini juga berdampak pada kestabilan siklus bisnis. Menurut Milton Friedman (1968) uang dapat menjadi faktor fundamental yang memengaruhi ekonomi riil.

Siklus bisnis adalah fluktuasi (naik turunnya) *output* dan kesempatan kerja secara periodik. Perekonomian akan mengalami fluktuasi diindikasikan oleh naik turunnya PDB dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek (*short run*) fluktuasi ini disebabkan a lain oleh perubahan permintaan agregat dan dalam jangka panjang asi disebabkan oleh perubahan modal, kualitas tenaga kerja dan teknologi



produksi. Menurut Lipsey et al., (1995) fluktuasi naik turunnya kegiatan ekonomi (siklus bisnis) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lembah (*Slump*)

Slump merupakan titik terendah ditandai dengan tingginya pengangguran, tingkat permintaan rendah, bila dibandingkan dengan kapasitas produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang konsumsi.

2. Pemulihan (*Recovery*)

Pemulihan terjadi apabila titik terendah terlampaui dan mulai terjadi titik balik. Gejala terjadinya tahap pemulihan adalah: mesin-mesin tua mulai diganti, kesempatan kerja, pendapatan, dan pengeluaran konsumsi mulai meningkat, investasi baru mulai dilakukan, produksi meningkat dan pengangguran berkurang.

3. Puncak (*Peak*)

Masa puncak merupakan tertinggi dari siklus ekonomi. Pada masa puncak terjadi penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi, kekurangan tenaga kerja (terutama tenaga kerja terampil) dan bahan baku mulai dirasakan. Output hanya dapat ditingkatkan dengan melakukan investasi yang menambah kapasitas.

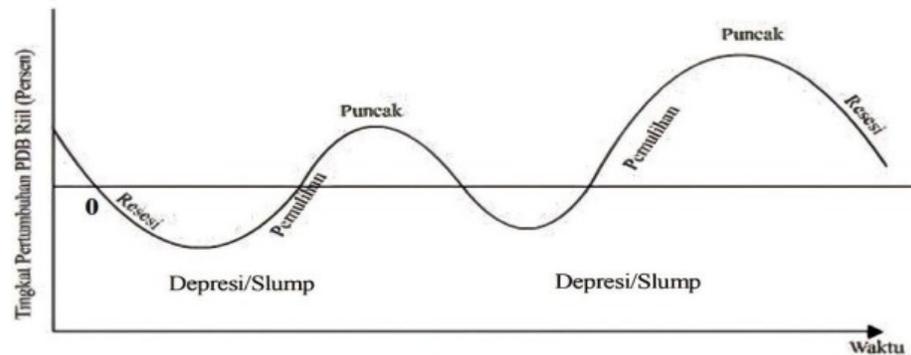
4. Resesi (*Recession*)

Resesi merupakan titik balik dari masa puncak kegiatan ekonomi, ditandai dengan jatuhnya GNP riil dalam dua kuartal berturut. Permintaan menurun dan sebagai akibatnya produksi dan kesempatan kerja berkurang, pendapatan rumah tangga menurun dan permintaan menurun.



5. Titik Balik (*Turning Points*)

Titik di mana suatu resesi dimulai sering disebut titik balik teratas (*upper turning point*). Titik di mana suatu pemulihan dimulai titik balik terbawah (*lower turning point*).



Sumber: Lipsey & Courant, 1995

Gambar 2. 1 Siklus Bisnis

Jika PDB riil mengalami penurunan dalam dua kuartal berturut-turut maka hal tersebut merupakan suatu indikasi terjadinya resesi, titik terendah dari resesi adalah lembah (*slump*), jika titik terendah terlampaui perekonomian suatu negara mengalami pemulihan dan akhirnya mencapai titik tertinggi (*boom/peak*) ditandai dengan penggunaan kapasitas produksi tertinggi, kekurangan tenaga terampil dan bahan baku dan seterusnya hal tersebut disebut siklus bisnis (Lipsey et al., 1995).

Output perekonomian dapat berfluktuasi baik karena tingkat *output* alami (*natural rate of output*) berfluktuasi atau karena *output* perekonomian menyimpang dari tingkat alamiahnya. Salah satu teori yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut adalah Teori Siklus Bisnis Riil (*Real Business Cycle Theory*), teori

out menjelaskan fluktuasi ekonomi (fluktuasi pertumbuhan ekonomi) abkan oleh perubahan teknologi produksi, dan dari sumber lainnya seperti



gangguan-gangguan dari luar negeri (*international disturbance*), fluktuasi cuaca (*climate fluctuations*), dan bencana alam (*natural disasters*) (Lipsey et al., 1995).

2.1.3 PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (rill). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan harga PDRB atas dasar harga konstan (rill) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Islam, 2020).

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran

3 bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari
3 harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.



Menurut Departemen Statistik ekonomi dan Moneter dari Bank Indonesia definisi PDRB per kapita adalah pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah yang diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Sedangkan tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang lain, dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian PDRB per kapita adalah pendapatan per kapita penduduk di suatu wilayah yang diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dimana PDRB per kapita didasarkan pada harga atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi

per kapita penduduk suatu negara (Damayanti, 2018).



2.1.4 Akumulasi Modal

Pendapatan sekarang yang ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang akan menyebabkan terjadinya akumulasi modal. Akumulasi modal membedakan investasi menjadi beberapa macam antara lain: 1) investasi sektor produktif berupa pabrik, mesin, peralatan, dan barang-barang baru yang akan meningkatkan *stock* modal, 2) investasi infrastruktur ekonomi dan sosial, berupa jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi untuk mempermudah kegiatan ekonomi, 3) investasi tidak langsung, yaitu pembangunan fasilitas irigasi agar dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian per hektar, dan 3) investasi insani bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh besar terhadap produksi.

Modal yang didapat untuk melakukan investasi bersumber dari tabungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dan perusahaan. Dana pembangunan dalam negeri berasal dari tabungan domestik dan ekspor, sedangkan dari luar negeri dapat berupa pinjaman bantuan maupun investasi asing. Sebagian besar negara menggabungkan kedua dana tersebut karena dana yang dihimpun dari dalam negeri tidak cukup untuk kebutuhan dana pembangunan. Sumber dana eksternal dimanfaatkan oleh suatu daerah sebagai dana tambahan disamping tabungan domestik (Triyanto, 2009). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penambahan modal berupa investasi dan tabungan.

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan dan sisi penawaran agregat. Dalam perekonomian dua sektor sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri atas dua komponen yaitu, konsumsi



dan investasi sehingga dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2008):

$$Y = C + I$$

Dimana Y adalah PDB/PDRB, C adalah konsumsi, I adalah Investasi. Sedangkan, dalam perekonomian terbuka sisi permintaan agregat terdiri atas empat komponen yaitu, konsumsi rumah tangga (C), investasi domestik bruto (pembentukan modal tetap dan perubahan stok) (I), konsumsi/pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (X-M). sisi permintaan agregat dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut (Tambunan, 2001).

$$Y = C + I + G (X - M)$$

Analisis Harrod-Domar dalam perekonomian dua sektor investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat.

2.1.5 Produktivitas Tenaga Kerja

Pada suatu organisasi, manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menjadi penggerak atas faktor-faktor produksi lain. Tanpa adanya manusia maka faktor produksi lainnya tidak berguna, untuk itu produktivitas kerja karyawan merupakan hal yang penting bagi suksesnya kegiatan perusahaan. Produktivitas kerja menurut Sinungan (2003) adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

rut Sedarmayanti (2011) menjelaskan bahwa produktivitas diartikan sebagai at efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa, produktivitas



mengutamakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Sedangkan Rosalinda (2022) menjelaskan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peranan serta tenaga kerja, peraturan waktu (lazimnya per jam kerja orang). Peran serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa produktivitas kerja itu adalah suatu kemampuan untuk memberikan hasil yang maksimal dengan menggunakan tenaga atau sumber daya yang minimum dan suatu perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) pada perusahaan. Dengan demikian produktivitas merupakan rasio dari keluaran terhadap masukan, makin tinggi rasio ini makin tinggi produktivitas. Tingkat produktivitas, pada periode tertentu maupun perbandingannya dengan rasio produktivitas dari waktu ke waktu merupakan tolak ukur yang penting.

Menurut Solow pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi memengaruhi tingkat *output* (Arsyad, 1999). Apabila dimisalkan suatu proses pertumbuhan ekonomi dalam kondisi teknologi belum berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya karena perubahan jumlah modal (K) dan jumlah tenaga kerja (L) dan hubungan kedua faktor-faktor tersebut.

ayani, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial, investasi, inflasi, ekspor, dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (1993) pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mangkoesoebroto (1994) model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total investasi sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena itu tahapan ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi.

Salah satu contoh peranan pemerintah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap masyarakat yaitu melalui belanja pemerintah disektor pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa

perbaiki standar hidupnya yang lebih layak dari batas minimum. Pengaruh pendidikan tidak hanya memengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan



keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seseorang terhindar dari kondisi miskin. Pengeluaran disektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu saran dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah disektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Todaro, 2000).

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembagian belanja pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah di Indonesia dapat bervariasi setiap tahunnya. Sebagian besar dana pendidikan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pembagian dana ini melibatkan beberapa faktor, termasuk jumlah siswa, tingkat kemiskinan, dan kinerja pendidikan di masing-masing daerah. Pemerintah pusat berusaha untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan adil dan efisien untuk mendukung pembangunan pendidikan di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pengaruh sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan kerangka *endogenous growth theory*, Romer (1994)

atakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari hasil eksogen Teori pertumbuhan eksogen seperti yang dikembangkan Solow-Swan atau d-Domar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena faktor



eksogen sistem ekonomi seperti perkembangan teknologi atau tingkat tabungan. Rangongo & Ngwakwe (2018) berpendapat bahwa banyak penelitian yang menyatakan stok modal manusia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Schultz (1961) menyatakan bahwa kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang efektif dan berkelanjutan yang diperoleh individu melalui pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang diperoleh individu melalui pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Upah

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Jadi yang dimaksud dengan upah yaitu sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi karena hasil bekerjanya dan permintaannya (Kadarisman, 2014). Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang atau akan dilakukan” (Cahyadi, 2022).



Salah satu kebijakan pemerintah terkait upah, yaitu dengan menetapkan upah minimum. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 tahun, agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (Maimun, 2007). Sedangkan, menurut Kurniawan (2019) upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional, maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah minimum juga merupakan upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral.

Maimun (2007) menjelaskan pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terbagi atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atas kabupaten/kota. Besar upah ini untuk tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah bersangkutan. KHL adalah standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik, nonfisik dan sosial.
2. Upah minimum berdasarkan sektor/sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu misalnya kelompok usaha manufaktur dan nonmanufaktur

Untuk menghindari pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan maka terdapat langkah yang bisa dilakukan yaitu



dengan cara kedua belah pihak melakukan perundingan atau negosiasi. Adapun yang diperoleh dengan cara tersebut adalah *pertama*, upah mencerminkan kemampuan perusahaan dan kemajuan pekerja yaitu perusahaan mempunyai kinerja baik akan memberikan kesejahteraan yang baik pula bagi pekerja. *Kedua*, fungsi upah sebagai dorongan motivasi karena pekerja akan memaksimalkan produktivitasnya agar perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena kinerja yang baik akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik pula.

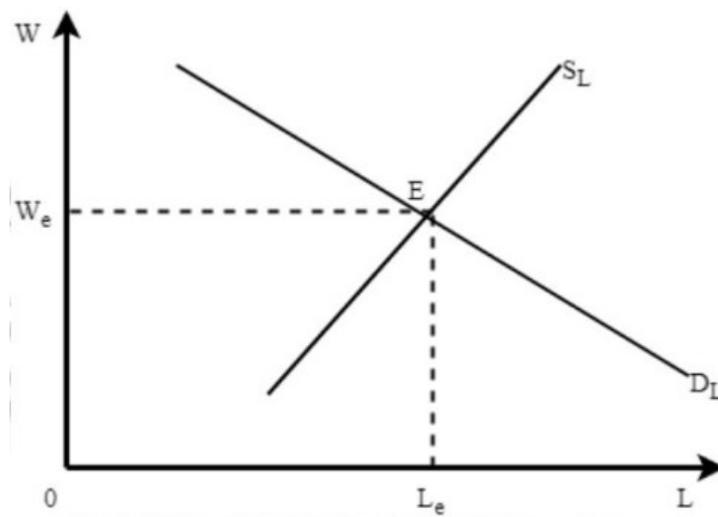
Menurut Sutansyah (2019) salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran yakni tingkat upah. Sucitrawati (2011) menyebutkan bahwa tingkat upah memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran baik positif dan negatif. Pada keadaan positif dapat dilihat dari total penawaran tenaga kerja, yang mana adanya kenaikan tingkat upah dapat menjadikan penawaran tenaga kerja mengalami kenaikan sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Mankiw (2012) memaparkan jika tingkat upah mengalami kenaikan maka akan memengaruhi peningkatan jumlah pengangguran, karena salah satu hal yang menyebabkan tingginya pengangguran ialah adanya kekakuan upah, yakni gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian hingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Penetapan upah minimum yang lebih rendah menjadikan perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Keynes dalam bukunya "The Genral Theory" mengungkapkan bahwasanya peningkatan dalam kesempatan kerja dapat terjadi jika tingkat upah mengalami penurunan.

Dalam pasar tenaga kerja penetapan upah merupakan suatu hal yang al, dimana dalam perundangan telah ditetapkan nilai upah minimum yang perusahaan bayarkan pada tenaga kerjanya (Mankiw, 2013). Upah



minimum ialah standar minimal yang telah ditetapkan untuk digunakan para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerjanya dalam lingkungan usaha, dimana setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki upah minimum yang berbeda-beda karena perbedaan pemenuhan kebutuhan hal ini disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kebijakan pemerintah atas penetapan upah minimum dapat berpengaruh terhadap angka pengangguran. Adanya perubahan upah akan berpengaruh pada besar kecilnya penawaran kerja.



Sumber: Mankiw, 2012

Gambar 2. 2 Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja

Kurva permintaan terhadap tenaga kerja sama dengan kurva permintaan terhadap barang, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi upah tenaga kerja yang diminta maka akan semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Sebaliknya, semakin sedikit upah yang diminta tenaga kerja maka akan semakin banyak permintaan terhadap

a kerja tersebut. Kurva penawaran tenaga kerja, seperti juga kurva penawaran terhadap barang, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas, hal itu berarti bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan maka akan semakin banyak



tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah upah yang ditawarkan maka akan semakin sedikit pula tenaga kerja yang mau menawarkan tenaganya (Ridheta, 2019).

Welch (1974) menyatakan bahwa terdapat mobilitas sempurna dari tenaga kerja, kenaikan upah minimum yang akan meningkatkan rata-rata upah di pasar tenaga kerja akan memberikan dampak meningkatnya penawaran tenaga kerja namun permintaan tenaga kerja justru menurun, sehingga tercipta kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran di sektor formal tersebut akan berpindah kepada sektor informal dengan asumsi mobilitas sempurna pasar tenaga kerja. Neumark et al., (2014) mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai dampak kebijakan upah minimum. Di mana upah minimum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan kualifikasi pekerja dengan *skill* rendah dan untuk melindungi mereka dari upah rendah, para pekerja ini juga termasuk dalam rumah tangga yang memiliki pendapatan yang rendah. Harapannya peningkatan upah minimum mampu meningkatkan kesejahteraan golongan pekerja rendah ini.

Seperti yang dikatakan Mankiw (2007) salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah upah. Studi yang dilakukan oleh A.W. Philips dalam meneliti sifat hubungan antara tingkat pengangguran serta kenaikan upah yang menyimpulkan kenaikan tingkat upah berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran (Sukirno, 2012).

Selain itu dampak dari meningkatnya upah minimum terhadap PDRB per adalah semakin meningkatnya nilai upah minimum regional maka ngkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan membuat usaha sehingga



produksi dalam wilayah akan semakin meningkat. Hal tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan PDRB per kapita (Putra & Yasa, 2020).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Kaitan Teoretis Akumulasi Modal, PDRB per Kapita, dan *Fiscal Stress*

Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian. Serta bagaimana pengaruhnya terhadap *output* barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (N. G. Mankiw, 2010). Analisis Harrod-Domar dalam perekonomian dua sektor investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan penambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat (Tambunan, 2011).

Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi keuangan membawa dampak terhadap *fiscal stress*. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah di mana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Septira et al., 2019). Daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan per kapita di daerah (Pulungan et al., 2017). Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga pemerintah daerah akan



berinisiatif untuk menggali sumber-sumber potensi daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Suatu daerah tidak dapat dikatakan sejahtera apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Jika yang terjadi sebaliknya maka dapat diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatnya. Maka dari itu, peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian suatu daerah (Soemitro, 2017). Kondisi yang ideal pada kondisi perekonomian suatu daerah adalah di mana pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, sehingga dapat meningkatkan PAD maka PDRB per kapita akan memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress* (Dwitayanti et al., 2019).

2.2.2 Kaitan Teoretis Produktivitas Tenaga Kerja, PDRB per kapita, dan *Fiscal Stress*

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat berdampak pada peningkatan standar hidup melalui peningkatan *output* sehingga akan terjadi peningkatan pada pendapatan. Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang sebenarnya (Sedarmayanti, 2009). Salah satu yang menjadi faktor meningkatnya produktivitas tenaga kerja disebabkan karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas perusahaan, di mana produktivitas



dianggap sebagai efek domino yang dapat meminimumkan biaya, sehingga laba secara otomatis diharapkan juga akan meningkat.

Seperti teori yang dikemukakan oleh Solow pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi memengaruhi tingkat *output* (Arsyad, 1999). Sehingga, peningkatan produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan PDRB per kapita yang akan berdampak pada kondisi fiskal suatu wilayah.

Keberhasilan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka PDRB per kapita mempunyai pengaruh terhadap *fiscal stress*. Adanya pengaruh yang mengakibatkan perubahan (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut (Dwitayanti et al., 2019).

2.2.3 Kaitan Teoretis Pengeluaran Pemerintah, PDRB per Kapita, dan

Fiscal Stress

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Keynes beranggapan bahwa asan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.



Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan PDRB per kapita (Muhammed, 2014).

Pertumbuhan PDRB per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Dengan PDRB yang meningkat menunjukkan aktifitas ekonomi masyarakat yang meningkat pula. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Artinya dengan PDRB yang tinggi maka daerah akan mampu membiayai kebutuhannya sendiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik. Dengan kemakmuran masyarakat di daerah, maka kondisi *fiscal stress* pada daerah akan berkurang (Syifa et al., 2021). Tetapi disisi pengeluaran pemerintah, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan terjadinya *fiscal stress* dikarenakan pengeluaran atau belanja publik meningkat di tiap daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Kaho (1998) yang menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya faktor kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Manulang (1995) menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya saat kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban telah diberikan kepadanya.



2.2.4 Kaitan Teoretis Upah, PDRB per Kapita, dan *Fiscal Stress*

Peningkatan upah akan menguntungkan hasil ekonomi agregat, seperti pertumbuhan PDB maupun PDRB. Maka semakin besarnya pendapatan yang didapat maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan PDRB per kapita mengalami kenaikan (Mashuri, 2018). Menurut Taylor et al., (2015) untuk menggerakkan permintaan agregat, upaya kebijakan untuk memacu kenaikan upah haru dilakukan. Aktivitas perekonomian yang diakibatkan oleh masalah tingkat upah yang menyebabkan kejadian demi kejadian yang merugikan perusahaan dan masyarakat itu sendiri, seperti mogok kerja dan melakukan demonstrasi yang berlarut-larut dapat mengalami penurunan produktivitas dan mengganggu aktivitas perekonomian secara luas. Termasuk jalannya investasi dari pihak luar untuk mendorong PDRB per kapita menjadikan pihak investor kurang percaya akibat ketidakstabilan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah (Alexander et al., 2017). Oleh karena itu, peningkatan upah akan mendorong terjadinya peningkatan PDRB per kapita.

Menurut Harrod-Domar jika pertumbuhan penduduk diimbangi oleh kenaikan pendapatan riil dan pertumbuhan tenaga kerja diimbangi oleh kenaikan output maka perekonomian bertumbuh mantap dalam jangka panjang (Irawan & Suparmoko, 2002). Jika pertumbuhan ekonomi rendah akan berdampak pada pendapatan yang akan berkurang dan itu berpengaruh terhadap anggaran belanja yang sebelumnya sudah dianggarkan menjadi tidak tercukupi. Hal tersebut yang

ebabkan tekanan anggaran (*fiscal stress*) karena pendapatan tidak dapat memenuhi anggaran belanja (Iciah et al., 2021). Kenaikan upah minimum



menjadikan masyarakat menuntut fasilitas publik yang lebih dari pemerintah sehingga kenaikan pendapatan di masyarakat akan memicu terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan *fiscal stress* suatu daerah jika tidak diimbangi oleh penerimaannya.

2.2.5 Tinjauan Teoretis Akumulasi Modal, Siklus Bisnis, dan *Fiscal stress*

Siklus bisnis merupakan kondisi di mana aktivitas ekonomi fluktuatif (aktivitas ekonomi tidak beraturan dan tidak dapat diprediksi). Di dalam siklus ekonomi terdiri dari kemakmuran dan resesi (ekspansi & kontraksi). Di mana jika terjadi resesi dalam sebuah perekonomian terjadi penurunan pendapatan (PDB) riil dan terjadi peningkatan pengangguran, di mana kondisi tersebut terjadi selama dua kuartal atau bahkan lebih. Pada teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, berpendapat bahwa dengan adanya investasi tentu akan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan memengaruhi dari sisi penawaran. Sehingga, kapasitas produksi meningkat yang akan berdampak pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin besar pula (Mulyadi, 2003).

Shamsub & Akoto (2004) menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. Faktor siklus bisnis seperti pertumbuhan, inflasi dan tingkat pengangguran. Indikator ekonomi ini sering memberikan “peringatan dini” tentang tekanan fiskal di masa depan.

; bisnis adalah fluktuasi (naik turunnya) *output* dan kesempatan kerja secara dik. Perekonomian akan mengalami fluktuasi diindikasikan oleh naik



turunnya PDB dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam menangani masalah pengangguran, pemerintah dapat menempuh beberapa macam kebijakan. Hal ini terkait dengan fungsi alokasi atas anggaran yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran (Jaelani, 2018). Sehingga, peningkatan pengangguran atau penurunan kesempatan kerja akan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang apabila tidak diimbangi dengan pendapatan pemerintah daerah akan menimbulkan *fiscal stress*.

2.2.6 Tinjauan Teoretis Produktivitas Tenaga Kerja, Siklus Bisnis, dan *Fiscal Stress*

Dalam fungsi produksi, apabila produktivitas mengalami peningkatan maka kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output akan meningkat sehingga akan berdampak terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja ini akan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, apabila produktivitas mengalami penurunan maka kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan *output* akan menurun sehingga akan berdampak terhadap penurunan permintaan tenaga kerja. Penurunan permintaan tenaga kerja ini akan meningkatkan tingkat pengangguran (Zulhanafi, 2013). Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat menurunkan biaya produksi per unit barang. Dengan turunnya biaya produksi per unit, pengusaha dapat menurunkan harga jual. Oleh sebab itu, permintaan masyarakat akan barang tersebut bertambah. Pertambahan permintaan akan barang mendorong pertambahan produksi dan selanjutnya mbah permintaan tenaga kerja (Simanjuntak, 1998).



Blanchard & Johnson (2013) menjelaskan bahwa walaupun kemajuan teknologi mampu memengaruhi produktivitas tenaga kerja yang akan menurunkan penggunaan tenaga kerja. Kembali lagi apakah *output* meningkat secara proporsional lebih besar atau lebih kecil dari produktivitas. Maka kenaikan produktivitas harus diimbangi dengan kenaikan *output* yang sama untuk menghindari penurunan lapangan kerja atau dapat dikatakan peningkatan pengangguran. Pada kondisi ekonomi (siklus bisnis) mencapai resesi hal tersebut ditandai dengan pengangguran meningkat. Wilayah atau daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan mendorong pemerintahnya untuk mengeluarkan anggaran yang lebih agar tingkat pengangguran dapat terasi, jika pengeluaran pemerintah meningkat dan tidak diimbangi dengan pendapatan maka suatu daerah akan mengalami *fiscal stress*.

2.2.7 Tinjauan Teoretis Pengeluaran Pemerintah, Siklus Bisnis, dan *Fiscal Stress*

Saat siklus bisnis atau kondisi ekonomi mengalami kontraktif pemerintah akan melakukan kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal yaitu dengan meningkatkan pengeluarannya, terutama untuk mengatasi terjadinya peningkatan pengangguran akibat kondisi ekonomi yang kontraktif, pemerintah akan mengikutsertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Sebuah daerah yang ingin merubah tingkat penganggurannya harus meningkatkan sektor pendidikannya, karena pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang kompeten maka akan mampu mengurangi angka pengangguran (Ishak, 2017).



Keynes mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk melakukan peningkatan permintaan di tingkat makro, mengurangi pengangguran dan terjadinya deflasi yang akan membantu keadaan ekonomi yang dari kondisi kontraktif menuju kondisi ekspansif (Curatman, 2010). Sehingga, jika pengangguran meningkat yang akan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang mana jika terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah terutama pada sektor pendidikan hal ini menyebabkan daerah tersebut mengalami *fiscal stress* jika tidak diimbangi oleh penerimaan daerahnya.

2.2.8 Tinjauan Teoretis Upah, Siklus Bisnis, dan *Fiscal Stress*

Menurut Sutansyah (2019) salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran yakni tingkat upah. Sucitrawati (2011) menyebutkan bahwa tingkat upah memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran baik positif dan negatif. Pada keadaan positif dapat dilihat dari total penawaran tenaga kerja, yang mana adanya kenaikan tingkat upah dapat menjadikan penawaran tenaga kerja mengalami kenaikan sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Mankiw (2012) memaparkan jika tingkat upah mengalami kenaikan maka akan memengaruhi peningkatan jumlah pengangguran, karena salah satu hal yang menyebabkan tingginya pengangguran ialah adanya kekakuan upah, yakni gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian hingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Penetapan upah minimum yang lebih rendah menjadikan perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Keynes dalam bukunya “The Genral Theory”

ungkapkan bahwasanya peningkatan dalam kesempatan kerja dapat terjadi tingkat upah mengalami penurunan.



Jika peningkatan upah minimum terjadi yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja yang akan menurunkan tingkat pengangguran pada akhirnya akan berdampak pada anggaran pemerintah yang meningkat dikarenakan peningkatan pendapatan akan membuat masyarakat lebih menuntut pelayanan publik yang lebih, sehingga pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya yang di mana jika tidak diimbangi oleh penerimaan daerah akan menyebabkan peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*).

2.2.9 Tinjauan Teoretis PDRB per Kapita, Siklus Bisnis, dan *Fiscal stress*

Dalam teori pertumbuhan jangka panjang, fokus utama dari perekonomian adalah peningkatan standar hidup dan tingkat pendapatan masyarakat (Jones & Vollrath, 2013), sedangkan dalam teori pertumbuhan jangka pendek, fokus utama tertuju pada stabilisasi fluktuasi siklus bisnis, yaitu fluktuasi *output* dan tingkat pengangguran (Mankiw, 2015). Siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi (naik atau turun) mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Sehingga siklus bisnis merupakan bentuk fluktuasi dari sekumpulan kegiatan ekonomi suatu negara dari semua bidang usaha. Didalam teori siklus bisnis yaitu teori internal dijelaskan bahwa siklus bisnis dipengaruhi oleh sistem ekonomi itu sendiri, apakah terjadi ekspansi atau kontraksi. Fase siklus bisnis dapat dilacak dari indikator aktivitas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB riil) (Suparman, 1985).



Siklus bisnis yang berubah-ubah dapat memunculkan permasalahan ekonomi berupa pengangguran. Masalah pengangguran akibat siklus bisnis yang berubah dapat memunculkan masalah ekonomi lainnya. Beberapa masalah ini meliputi kemiskinan, kesenjangan sosial akibat penyebaran pendapatan yang tidak merata dan masalah sosial. Dampak dari siklus bisnis yang berubah-ubah diatasi dengan kebijakan ekonomi yang mencakup kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Seftarita, 2014). Siklus bisnis menentukan strategi kebijakan fiskal yang akan diterapkan oleh suatu negara. Sehingga, jika terjadi kontraksi dengan ditandai tingkat pengangguran suatu daerah meningkat maka pemerintah daerah tersebut akan membuat kebijakan fiskal salah satunya melalui peningkatan belanja, dan apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan daerah maka akan terjadi *fiscal stress*.

2.3 Tinjauan Empiris

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak mengenai *fiscal stress* baik di Indonesia maupun di negara lain diantaranya:

Ilham Sanjaya, Rita Martini, Muhammad Fauzan Ahnaf, dan Anton Trianto melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan menganalisis pengaruh pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal stress* di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Icih, Asep Kurniawan, dan Rijal Fadillah dalam penelitiannya tahun 2021 mengungkap pengaruh pendapatan daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dari



PDB, dana alokasi umum, desentralisasi dan diversifikasi fiskal pendapatan daerah terhadap *fiscal stress*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fiscal stress*, 2) Belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *fiscal stress*, 3) Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fiscal stress*, 4) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fiscal stress*, 5) Desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, 6) Diversifikasi pendapatan daerah secara parsial berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Finky Septira dan Ida Farida Adi Prawira melakukan penelitian pada tahun 2019 yang dalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB terhadap *fiscal stress* pada kabupaten dan kota se-Sumatera tahun 2014-2016. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Hannarong Shamsud dan Joseph B. Akoto dalam penelitiannya tahun 2017 tentang “*State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan didalam komposisi struktur pajak dibandingkan dengan total pendapatan, pengeluaran yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan *fiscal stress*, diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*, diversifikasi pendapatan dan desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai langkah untuk mengurangi *fiscal stress*.



Meta Adriana, Yessi Muthia Basri, dan Novita Indrawati dalam penelitiannya pada tahun 2017 yang dalam penelitiannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pertumbuhan PAD, diversifikasi fiskal, PDRB, pertumbuhan belanja modal, dan diversifikasi pendapatan daerah terhadap *fiscal stress* baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa secara parsial pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*, pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*, pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*, dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Secara simultan pertumbuhan PAD, diversifikasi fiskal, PDRB, pertumbuhan belanja modal dan diversifikasi pendapatan daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

